

PROFESIONALISME CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DI KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO.

Usson Yikwa¹
Ventje Kasenda²
Alfon Kimbal³

Abstrak

Profesionalisme camat hakiki menekankan pada suatu sikap pengabdian pada profesi sehingga terlaksana mutu yang baik akan halnya pelayanan publik yang di tunjukan dari seorang camat mengepalai maupun membina serta mengorganisir bawannya dalam penyelenggaraan pemerintah di karenakan camat menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai perangkat daerah ataupun delegatif dari bupati / walikota. Tentunya sebagai perangkat daerah maupun pengelola kehidupan kolektif untuk mencapai tujuan bersama secara nyaman wajar demi mewujudkan kehidupan harmonis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun secara faktual yang terjadi di lapangan khususnya Kecamatan Malalayang, terutama camat beserta bawahannya kurang mampu mengelola maupun menjalankan roda penyelenggaraan pemerintah mumpuni sehingga ini dapat di buktikan pelayanan publik yang tidak maksimalisasi dengan tidak adanya ketetapan jam pengangkutan sampah, pungkutan liar yang kerap terjadi dalam pengurusan administrasi publik, fasilitas kurang memadai. Jika semua bisa teratasi lewat dari resolusi seorang camat sebagai penyelenggraan pemerintah yang bersifat delegatif lewat koordinasi maupun mengorganisir bawahannya tentunya berbagai kendala yang serin di hadapi / jumpai biasa teratasi serta dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan mempertimbangkan tujuan yang di ingin dari pada suatu daerah.

Kata Kunci : Profesionalisme, Camat, Dan Pemerintah.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

Pendahuluan

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintah di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya di wilayah kecamatan. Salah satu wujud pemerintah yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah kecamatan. Sebagai subsistem, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategi dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintah, pembangunan serta kemasyarakatan.

Perubahan pengertian kecamatan sebagaimana dikemukakan di atas membawa konsekuensi pada perubahan kedudukan camat sebagai pimpinan organisasi kecamatan. Camat sebagai perangkat daerah yang bertugas memberikan pelayanan tertentu, yang tidak lagi berkewajiban untuk ikut menjalankan sebagian tugas/kewenangan Kabupaten/kota. Camat dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati/wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Besar kecilnya fungsi dan peran camat akan sangat tergantung seberapa besar Delegasi kewenangan yang diberikan oleh bupati/wali kota kepadanya. Berkaitan dengan kecamatan secara faktual keberadaan

kecamatan sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan pada masyarakat dan terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*). Secara Filosofi, kecamatan yang dipimpin oleh camat seharusnya di dasarkan pada aspek tersebut diatas, dan juga sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya menyelenggarakan pemerintah di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah Kabupaten/kota. Dengan demikian, peran camat dalam penyelenggaraan pemerintah lebih sebagai pemberi makna di wilayah kecamatan sebagai pelayan umum.

Pelimpahan kewenangan bukan hanya sekedar memberikan legalisasi kewenangan kepada camat, melainkan diarahkan pada upaya peningkatan efektifitas dan efisien pelayanan kepada masyarakat serta penggunaan dana dan fasilitas publik. Pelimpahan kewenangan harus mampu mendorong terciptanya kemudahan dan kecepatan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan, sekaligus juga memberikan kesempatan partisipasinya dalam pembangunan. Camat sebagai motor penggerak di kecamatan telah mengaktualisasikan perannya dalam pemerintahan dan pembangunan, namun hal tersebut dinilai belum efektif dan efisien. Pelayanan yang diberikan belum memberikan kualitas pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Profesionalisme camat Malalayang dalam memfasilitasi kepentingan masyarakat belum merata dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat dan

belum menampakkan kualitas pelayanan publik yang baik. Menurut pengamatan peneliti dalam penyelenggaraan pemerintah di kecamatan Malalayang di temui beberapa kendala atau masalah yaitu sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pemerintah di kecamatan malalayanag berkujungan satu kelurahan satu bulan, 9 (*sembilan*) kelurahan yang ada, camat tidak perna menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak terlaksana dengan baik.
2. Dalam melaksanakan tugas tanggung jawab dan pekerjaannya sebagai camat, masyarakat kurang mendapatkan manfaat sosial, mereka hanya mendapatkan manfaat lingkungan hidup lewat pekerjaan/program yang di canangkan oleh pemerintah kecamatan malalayang dengan menyediakan motor pengangkut sampah.
3. Dalam pelayanan masyarakat di kantor camat malalayang fasilitas pelayanan umum belum lengkap yang ada hanya dua buah komputer, Adanya peralatan kantor yang kurang lengkap serta tidak memberikan Kenyamanan saat bekerja dan sangat mempengaruhi penyelesaian suatu pekerjaan, hal itu berarti bahwa peralatan yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dari pekerjaan tersebut, agar dapat di penuhi harapan masyarakatnya".
4. Dalam membangun relasi kerja di pemerintah malalayang kurang berjalan secara baik, dimana seketika camat kecamatan sedang keluar daerah tidak adanya jalinan komunikasi, koordinasi dan pendelegasian wewenang, sehingga

pelayanan pada masyarakat bisa terlambat apabila camat sedang berada diluar daerah,

Tinjauan Pustaka Profesionalisme

Istilah Profesionalisme Menurut Siagian (dalam Kurniawan, 2009,34), Profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelagan atau masyarakat. Dalam keseharian Profesionalisme dipahami sebagai cara bekerja secara profesional, menguasai bidang kerja, kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kinerja yang tinggi.

Demikian juga dengan apa yang dikatakan oleh Korten & Alfonso (1981) dalam Tjokrowinoto (1996:178) dalam bukunya Hesel Nogis S. Tangkilisan (20010:225,) dimaksud dengan profesionalisme adalah "kecocokan (*fitness*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas (*task-requirement*), antara lain:

1. Merencanakan adalah suatu usaha untuk mempengaruhi fungsi, struktur, atau penyerapan satu tujuan organisasi atau lembaga pemerintahan
2. Mengkoordinasikan melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi
3. Melaksanakan fungsi secara efisien mengambil langkah-langkah yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin di capai
4. Etos kerja tinggi adalah giat, rajin dan serius tunduk kepada otoritas yang lebih tinggi, Kreatif,

Mandiri dan Siap Bekerja Sama dalam menghadapi tantangan

Menurut pendapat tersebut, kemampuan aparatur lebih diartikan sebagai kemampuan melihat peluang-peluang yang ada bagi pertumbuhan ekonomi, kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin dicapai dan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh kembang dengan kekuatan sendiri secara efisien, melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi, bersifat fleksibel, dan memiliki etos kerja tinggi.

Menurut pendapat tersebut, kemampuan aparatur lebih diartikan sebagai kemampuan melihat peluang-peluang yang ada bagi pertumbuhan ekonomi, kemampuan untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dengan mengacu kepada misi yang ingin dicapai dan kemampuan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tumbuh kembang dengan kekuatan sendiri secara efisien, melakukan inovasi yang tidak terikat kepada prosedur administrasi, bersifat fleksibel, dan memiliki etos kerja tinggi.

Selanjutnya menurut Kurniawan (2007: 23), Istilah Profesionalisme itu berlaku untuk semua aparat pegawai mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan ketrampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi dengan kebutuhan tugas. Terpenuhinya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan salah satu syarat terbentuknya pegawai yang profesional.

*Sekretariat:
Gedung C, Lantai 2, Fispol Unsrat.
Jl. Kampus Bahu Unsrat Manado*

Konsep Camat

Camat menurut *bayu suryaningerat* (2009 : 2) adalah seorang yang mengepala dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat adalah pemimpin di kecamatan dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Camat juga merupakan kepala pemerintahan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota, oleh karena itu camat memiliki tugas:

1. Menjalankan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh kepala Daerah.
2. Memimpin pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di wilayah kecamatan
3. Membantu sekretaris daerah dalam menyiapkan informasi mengenai wilayah kecamatan yang di butukan dalam perumusan kebijakan bagi kepala daerah
4. Pembinaan pelayanan Umum

Konsep Pemerintah

Ramlan Surbakti (1992, 168) Menyatakan istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda artinya. Dimana Pemerintahan menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan pemerintah merupakan aparat yang menyelenggarakan tugas dan kewenangan negara.

Syafiie (2011:23): Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan

(eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar. Secara etimologi pemerintahan dapat di artikan sebagai berikut:

1. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan. Setelah di tambah awalan "pe-" menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
2. Setelah di tamba akhiran "-an" menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Menurut W.S Sayre (Syafiie 2011:9), pemerintahan dalam definisi terbaik adalah sebagai organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya.

Di beberapa Negara antara pemerintah dan pemerintahan tidak di bedakan. Misalnya, Inggris menyebutnya "Government" Prancis menyebutnya "Gouvernement" keduanya berasal dari perkataan latin "Gubernaculum" yang biasa sekarang kita sebut dengan "Gubernur". Dalam bahasa Arab di sebut dengan "Regering" sebagai penggunaan kekuasaan Negara oleh yang berwenang untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan Negara, dan sebagai penguasa menetapkan perintah-perintah. Jadi, "Regen" digunakan untuk pemerintahan pada tingkat nasional, sedangkan "Bestur" diartikan sebagai keseluruhan badan pemerintah dan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan usaha mewujudkan kesejahteraan

rakyat. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan rodah pemerintahan. Sedangkan di katakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah memenuhi persyaratan yaitu dapat di pelajari dan di ajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas). Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata "Perintah" tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkadang, kedua pihak saling memiliki hubungan, baik yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perinta memiliki ketaatan.

Pemerintahan adalah gejala social yang tak terhindarkan dan ada di manapun. Pemerintahan lahir sebagai kebutuhan manusia, Pemerintahan merupakan organisasi paling tua di muka bumi. Pemerintah merupakan organisasi yang di kendalikan oleh seseorang, sekelompok orang, bahkan banyak orang. Pemerintah merupakan salah satu-satunya organisasi yang memiliki otoritas istimewa. Pemerintah merupakan organisasi yang memperoleh otoritas dari Tuhan dan orang banyak. Pemerintah adalah sekelompok orang yang melakukan tugas pemerintah sebagai wujud dari kontrak social. Pemerintah sebagian orang yang memiliki kewajiban menjalankan amanah orang banyak ke arah tujuan yang di sepakati. Pemerintahan, adalah proses dimana sekelompok orang yang memiliki kepercayaan mengelola kehidupan kolektif untuk mencapai tujuan bersama secara nyaman dan wajar. Pemerintahan, merupakan proses

interaksi antara kelompok orang yang memerintah dengan sekelompok orang yang di perintah dalam mencapai tujuan bersama. Pemerintah menjalankan tugas jasa public dan layanan civil. Pemerintah adalah personifikasi konkrit dari pengelolaan suatu Negara.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrument kunci. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (*natural setting*) dan data yang di kumpulkan umumnya bersifat kualitatif. Oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian kualitatif. Menurut Sugiono (pasalong, 2013:161), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, sebagai lawannya eksperimen, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (*gabungan*), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna, dari pada generalisasi. Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan di anggap memuaskan. Alat pengumpulan data atau instrument peneliti dalam metode kualitatif ialah isi peneliti sendiri. Jadi, peneliti merupakan *human instrument*, dalam mengumpulkan data peneliti harus terjun sendiri ke lapangan secara aktif. Teknik pengumpulan data yang sering digunakan ialah observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi. Camat Malalayang : 1 (satu) orang

1. Sekrestaris Kecamatan Malalayang

2. Perangkat Kecamatan Malalayang
3. Lurah Malalayang satu timur
4. Lurah Bahu
5. Lurah Kleak
6. Toko Agama
7. Masyarakat

Hasil Penelitian

Profesionalisme Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Di tingkat kecamatan, camat memegang peranan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Camat sebagai kepala wilayah merupakan salah satu komponen dari pada aparatur pemerintah yang mempunyai tugas sebagai pengkoordinator, penggerak dan sekaligus sebagai pelaksana pembangunan di wilayah kecamatan mempunyai tugas-tugas yang sangat berat. Untuk menjawab pertanyaan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka peneliti berusaha menjabarkannya melalui hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian yakni profesionalisme camat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum seperti yang diuraikan pada Peraturan Pemerintah Wali kota Manado Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 4 yang menyebutkan Camat menyelenggarakan tugas meliputi:

Pengabdian Pada Profesi

Teori menurut: Hall (2009) dalam Kusuma (2012:62) Pengabdian pada profesi dicerminkan melalui dedikasi profesionalisme dengan menggunakan pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki serta keteguhan untuk tetap melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik tidak sebanding. Sikap ini adalah ekspresi dari pencurahan diri yang total terhadap pekerjaan. Pengkoordinasian kegiatan Pelayanan masyarakat adalah suatu

kegiatan yang berkesinambungan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara berkelanjutan dan turut serta dalam pembangunan. Ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh pemerintah, baik mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan sampai pada pemerintah kelurahan. Dengan berbagai program sosialisasi pentingnya proses pelayanan melalui tim fasilitator dan team leader penggerak pembangunan kecamatan, pembangunan fisik, lingkungan, ekonomi produktif, sosial kemasyarakatan, pembagian uang secara cuma-cuma dan lain sebagainya bentuk program pelayanan masyarakat yang sudah dan sering berjalan. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pelayanan masyarakat, adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengadopsi inovasi dan memiliki pola pikir yang kosmopolitan. Faktor peningkatan pelayanan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Pelayanan masyarakat bertujuan mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri atau membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri. Di Kecamatan Malalayang peran camat dalam pengkoordinasi pelayanan masyarakat yang ada di kecamatan sangat berpengaruh.

Dalam meningkatkan kinerja Camat di Kecamatan Malalayang, tentunya sangatlah urgen, sehingga dibutuhkan kemampuan seorang camat dalam memberikan pelayanan yang

efektif kepada masyarakat, juga camat sudah melakukan pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-belit kepada masyarakat dan juga tidak ada pungutan biaya administrasi dalam bentuk apapun, sehingga telah memberikan kepuasan kepada masyarakat dari kinerja camat dalam penyelenggaraan pemerintah di kecamatan.

Hal ini tentunya hal yang cukup demi pelayanan kepada masyarakat. berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sejauh ini dapat disimpulkan bahwa, Camat Kecamatan Malalayang belum cukup kreatif dalam menjalankan tugas pengabdian pada profesi yang dibangun luhur batin dengan mengoptimalkan semua tugas pelayanan kepada masyarakat terutama transparansi namun di sisi lain camat mulai melibatkan diri dalam mengkoordinasi dalam penyelenggaraan pemerintah di kecamatan.

Kewajiban Sosial

Teori menurut: Hall (2009) dalam Kusuma (2012:62), Kewajiban sosial di cerminkan dari pandangan tentang pentingnya peranan profesi dan manfaat yang diperoleh baik bagi masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut. Pengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ketentraman dan ketertiban umum adalah hal yang sangat berpengaruh dalam suatu lingkungan sosial, tingkat kelurahan dan ketertiban suatu wilayah merupakan hal yang mutlak untuk diusahakan, begitu pula dengan wilayah kecamatan, profesi Camat dalam memberikan pelayanan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam hal ini camat sebagai koordinator dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

sangat dibutuhkan. Dalam pelayanan kepada masyarakat harus diperhatikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan mengenai profesionalisme camat dalam pengkoordinasi ketentraman dan ketertiban umum dapat di nilai cukup baik.

Hasil yang diperoleh dari informan berdasarkan hasil wawancara diatas jelas terlihat bahwa camat kurang berhasil dalam mengkoordinasi ketentraman dan ketertiban di Kecamatan Malalayang, hal ini meninjau hasil wawancara yang telah di lakukan sejauh ini dapat di simpulkan dalam pelaksanaan pemerintah Kecamatan Malalayang belum cukup baik kreatif dalam menjalankan tugas Kewajiban sosial terutama mengenai permasalahan sampah serta kurang nampak secara ketetapan waktu pelaksanaan kegiatan bermasyarakat yang turut dirasakan masyarakat itu sendiri.

Kemandirian

Teori menurut: Hall (2009) dalam Kusuma (2012:62), Kemandirian dalam hal ini diartikan dengan pandangan bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Adanya campur tangan dari luar dianggap sebagai hambatan kemandirian secara profesional. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum Dalam pelayanan kepada masyarakat, prasarana dan fasilitas yang menunjang sangat berpengaruh besar, ketersediaan fasilitas dalam menunjang pelayanan merupakan hal yang tidak dapat dipandang sebelah mata, dengan adanya fasilitas tersebut, maka pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan

dengan baik. Di Kecamatan Malalayang prasarana dan fasilitas pelayanan umum di telah tersedia walaupun belum lengkap, dalam pemeliharannya camat menugaskan seksi fasilitas dan prasarana. Untuk mengetahui peran camat dalam bidang tersebut penulis, mewawancarai kase fasilitas dan prasarana tata pemerintahan,informan Ibu D. J. beliau mengatakan: "*Camat selalu memperhatikan prasarana dan fasilitas demi lancarnya pelayanan kepada masyarakat, camat selalu mengingatkan kami agar selalu memperhatikan setiap fasilitas yang ada. Namun keterbatasan fasilitas yang ada menjadi kendala dalam pelayanan kepada masyarakat.*

Hal ini didukung oleh informan Ibu. T.D masyarakat Kelurahan Malalayang dua mengurus akte di kecamatan, beliau mengatakan bahwa: "*keadaan fasilitas di kecamatan cukup namun masih kurang, harus ditambah beberapa komputer, dan beberapa penunjang lainnya dalam pelayanan kepada masyarakat.*

Hal ini juga diungkap salah satu masyarakat kelurahan malalayang satu timur yang menjadi informan D.S menuturkan bahwa: "*Selama ini saya melihat pelayanan kepada masyarakat cukup bagus namun sering kali terjadi kerhambatan dikarenakan beberapa prasarana fasilitas umum kurang memadai bahkan sudah rusak misalnya komputer maupun motor pengangkut sampah sampai saat ini belum ada perbaikan maupun dilengkapi fasilitas yang ada".*

Hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa camat melakukan tugasnya cukup dalam mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di Kecamatan Malalayang namun ada beberapa persoalan prasarana fasilitas umum

yang belum terselesaikan berupa penambahan kapasitas komputer serta pelengkap lainnya maupun rusaknya beberapa motor pengangkut sampah hal ini sepatutnya camat dapat melakukan suatu kiat untuk menyelesaikan persoalan tersebut sehingga keterhambatan dalam proses pelayanan kepada masyarakat bisa teratasi.

Keyakinan Terhadap Profesi

Teori menurut: Hall (2009) dalam Kusuma (2012:62), Keyakinan terhadap profesi adalah suatu keyakinan bahwa yang paling berwenang menilai pekerjaan profesional adalah rekan sesama profesi, bukan orang luar yang tidak mempunyai kompetensi dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan Proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, Camat dalam memberikan pelayanan pada masyarakat diharapkan mampu menciptakan keadaan yang lebih baik walaupun terdapat berbagai permasalahan yang ditemui langsung di kecamatan. Hal ini akan menjadi barometer utama dari kepemimpinan camat. Apakah sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkesan tidak apatis atau pilih kasih, tidak kaku, tidak berbelit-belit, tidak panjang dan melelahkan, serta tidak adanya berbagai bentuk pemungutan liar. Berdasarkan tugas camat sebagai pengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan, sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Pelayanan Publik.

Hal ini dapat dilihat dari bentuk kerja sama antara camat dengan aparat kecamatan. Seorang camat biasanya mempunyai tanggung jawab khusus dalam setiap pelaksanaan program kerja walaupun pada dasarnya setiap program

kerja yang ada menjadi tanggung jawab bersama dengan aparat kecamatan. Tanggung Jawab Camat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangatlah dituntut sesuai dengan mekanisme aturan pelayanan yang semestinya, baik oleh staf kecamatan maupun oleh masyarakat sebagai pihak yang dilayani, serta sikap camat terhadap aparat kecamatan dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan tinjauan di atas menunjukkan keterjalinan antara camat dengan aparat kecamatan dan kelurahan cukup harmonis maupun baik kepada masyarakat namun sering kali di temui kecerobohan dari pihak pemerintah kecamatan terutama camat mengenai permasalahan sampah tidak adanya pengangkutan sampah di hari-hari tertentu sebagian rumah-rumah warga masyarakat inilah kurang keyakinan yang dibangun dari luhur batin berupa koordinasi ataupun perintah kepada lurah yang ada di Kecamatan Malalayang untuk mengatasi hal tersebut.

Hubungan Dengan Sesama Profesi

Teori menurut: Hall (2009) dalam Kusuma (2012:62), Hubungan dengan sesama profesi adalah menggunakan ikatan profesi sebagai acuan, termasuk didalamnya organisasi formal dan kelompok kolegal informal sebagai kolegal informal sebagai ide utama dalam perjalanan melalui ikatan profesi ini para profesional membangun kesadaran profesional. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan; dan Dalam menjalankan tugas pemerintahan sikap dari seorang camat sangatlah menentukan hasil kerja dari setiap program kerja yang dicapai,

baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun Kelurahan-kelurahan. Hal ini dapat dilihat dari proses komunikasi yang mencakup bagaimana cara mengekspresikan diri secara jujur tanpa merendahkan para staf, bersikap tidak menghakimi dengan berusaha untuk menghindari ketersinggungan, bersikap ramah, santun dan sikap menghargai waktu.

Berdasarkan Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat dilihat dari aspek hubungan relasi dari camat dengan aparat kecamatan maupun kelurahan berjalan dengan cukup baik dan harmonis ini dibuktikan dengan adanya sikap koordinasi dari camat kepada bawahan sampai tingkat kelurahan untuk mencapai kepuasan masyarakat mengenai pelayanan.

Kesimpulan

1. Pengabdian pada Profesi secara umum pelaksanaan profesionalisme camat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi camat berjalan dengan cukup baik berdasarkan beberapa aspek keterlibatan umum, pelayanan masyarakat serta fasilitas sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Malalayang.
2. Kewajiban sosial Camat berhasil membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan dan menjalankan tugas pemerintahan dengan cukup baik namun di lain sisi masih terdapat sejumlah persoalan yang menjadi masalah dalam pelayanan kepada masyarakat berupa kejelasan transparansi dalam pengurusan administrasi kependudukan maupun kurangnya memadai komputer serta pelengkap lainnya sebagai fasilitas penunjang sehingga

terjadi kendala ataupun keterhambatan, karena sikap dari seorang camat sangatlah menentukan hasil program kerja yang dicapai, cukup baik hubungan dengan aparat kecamatan maupun kelurahan.

3. Kemandirian pelayanan tinggi merupakan sebuah sikap yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal.
4. Keyakinan terhadap profesi Pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Malalayang berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya berupa tidak adanya ketetapan waktu pengangkutan sampah di kala hari tertentu hal ini mengakibatkan terjadinya ketidak selarasan dengan lingkungan berupa bau yang tidak sedap dikarenakan rusaknya beberapa motor pengangkut sampah.
5. Hubungan dengan sesama profesi Kepemimpinan camat sangat berpengaruh dari hasil pelayanan dari suatu instansi kerja di Kecamatan Malalayang.

Saran

1. Untuk mendapatkan kualitas pemerintahan yang efektif dan efisien, sangat penting memilih profesionalisme camat yang berkompeten dibidangnya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
2. Perlu Pemberian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat haruslah bersikap transparan dan jujur, untuk itu kepada camat diharapkan dapat memperlihatkan prosedur penyelesaian atau Standar Operasional Prosedur dari setiap

- permasalahan agar masyarakat tidak merasa dibohongi ataupun dibodohi.
3. Perlu adanya pembinaan serta pelatihan untuk camat dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan.
 4. Dalam setiap masalah yang memerlukan pengurusan di Kecamatan harus dijelaskan ataupun ditulis dalam papan informasi, masalah tersebut memerlukan biaya berapa dan memerlukan waktu penyelesaian berapa lama. Sehingga semua itu bisa menjadi tolak ukur masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari Kecamatan dalam hal transparansi pelayanan publik.
 5. perlunya meningkatkan kemampuan camat dalam pelayanan, bukan adanya melalui kegiatan musyawarah yang di lakukan secara non formal seperti melakukan kunjungan kelurahan atau lingkungan untuk mencari tahu apa yang di butukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mulana Eko, 2012. *Kepemimpinan Transformasi dalam Birokrasi Pemerintahan*. Jakarta: PT. Multicerdas Publishing.
- Anonim, Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2007. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2017 *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance*. Bandung: Cv. Mandar Maju Sumpersari Indah, Bandung.
- Makhya Syarief, 2007, *Ilmu Pemerintahan (Telaah Awal)*. Bandar Lampung Universitas Lamoung.
- Pramosito Agus E.A.P, 2009. *Reformasi Birokrasi Kepemimpinan dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta Gava media.
- Puspito Hesti, Kurniawan J.L.K, 2012. *Filosofi Pelayanan Publik. Jaringan nasional* Malang : Cv.MP3.
- Purwono. 2013. *Profesi Pustakawan Menghadapi Tantangan Perubahan*. Yogyakarta: Graha ilmu.
- Sjafri Sairin Membangun Profesionalisme Muhammadiyah, Yog yakarta: PT. Nusa Bakti.
- Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor .17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
- Peraturan Pemeritanh WaliKota Manado Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dan Kelurahan. Kantor Camat Kecamatan Malalayang Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018.